

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DIMASA  
PANDEMI COVID-19 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rahmat Qaeddy

NPP. 28.0138

*Asal Pendaftaran Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: [kidyrahmat@gmail.com](mailto:kidyrahmat@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Medan City Government has several regional revenues, one of which is Regional Original Revenue (PAD) from the terminal retribution sector. Terminal retribution revenue in Medan City in 2018 and 2019 reached more than 95% of the local government's target. However, in 2020 the acceptance of terminal fees is only 49% of the local government's target, this is due to the Covid-19 pandemic which began to enter Indonesia in March 2020 which caused the national economy to decline and also had an impact on Regional Original Revenue from the terminal retribution sector.

The Medan City Transportation Agency has made various efforts to minimize the impact of the Covid-19 pandemic which has caused a decrease in regional revenue from the terminal retribution sector. The purpose of this study is to see the optimization of the collection of terminal fees during the Covid-19 pandemic. In this study, the researcher used Sutedi's theory which was used to analyze the data and assess whether the collection was optimal.

Based on the results of the discussion, it is concluded that the optimization of the collection of terminal fees during the Covid-19 pandemic carried out by the Medan City Transportation Agency has been quite optimal. Although there is still a decline in revenue, in addition to this, the Medan City Transportation Service can still minimize the impact of the pandemic by optimizing the collection that is running well.

Keywords: Terminal Retribution, Optimization, PAD

**ABSTRAK**

Pemerintah Kota Medan memiliki beberapa penerimaan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi terminal. Pendapatan retribusi terminal di Kota Medan pada tahun 2018 dan 2019 mencapai lebih dari 95% dari target pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2020 penerimaan retribusi terminal hanya 49% dari target pemerintah daerah, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada maret 2020 yang menyebabkan perekonomian nasional terpuruk dan berdampak juga pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi terminal.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah dari sektor retribusi terminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat optimalisasi pemungutan retribusi terminal dimasa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Sutedi yang digunakan untuk menganalisis data, serta menilai apakah pemungutan telah optimal.

Berdasarkan hasil pembahasan maka disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi terminal dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah cukup optimal. Walaupun tetap terjadi penurunan penerimaan, disamping hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan tetap bisa meminimalisir dampak pandemi dengan optimalisasi pemungutan yang berjalan baik.

Kata Kunci: Retribusi Terminal, Optimalisasi, PAD

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Daerah otonom dalam hal ini memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan daerah. Dana tersebut kemudian akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Terminal. Terminal telah menjadi salah satu penunjang dasar dalam pelayanan angkutan darat. Keberadaan terminal di suatu daerah dibutuhkan masyarakat terutama di Kota Medan dimana banyak pekerja yang datang dan pergi dari luar kota yang cukup jauh untuk bekerja ataupun yang menjadi pelajar atau mahasiswa di Kota Medan. Pada awal tahun 2020 terjadi sebuah bencana yaitu penyebaran virus corona yang kemudian menjadi sebuah pandemi yang hingga saat ini telah menyebar di 216 negara di seluruh dunia yang selanjutnya di sebut sebagai *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. *Covid-19* sendiri mulai masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020. Dampaknya langsung terasa diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan adanya protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang dengan sangat jelas melarang adanya keramaian yang biasanya terjadi di ruang pulik termasuk terminal tentu saja sangat berdampak pada berkurangnya kemauan masyarakat untuk datang ke terminal dan lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi untuk keamanan dirinya sendiri. Penurunan retribusi terminal ini akan mengganggu Pendapatan Asli Daerah yang telah di proyeksikan pada APBD 2020. Namun, berbeda dengan beberapa pajak yang masih bisa sedikit ditutupi dari dana insentif dari pemerintah pusat, retribusi daerah adalah sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sehingga, segala resiko harus ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah tetap mendapatkan penerimaan retribusi terminal secara optimal dengan segala kendala yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran *covid-19*.

## **1.2. Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi selama melaksanakan Optimalisasi retribusi terminal ini, antara lain: Masih adanya angkutan umum yang menghindari petugas pemungutan Retribusi Terminal, Banyaknya calo atau orang yang menjadi perantara untuk menjual tiket secara ilegal, Banyaknya pedagang ilegal di kawasan terminal, Kurangnya petugas Dinas Perhubungan yang berada di lapangan, dan Fasilitas terminal yang dianggap masih belum memadai.

## **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu. Penelitian Nita Madhav yang berjudul *Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty, Chapter 17 Pandemic: Risk, Impact, and Mitigation* mengemukakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah “*individual behavioral changes, such as fear-induced aversion to workplaces and other public gathering places, are a primary cause of negative shocks to economic growth during pandemic.*” Artinya “perubahan perilaku individu, seperti kengganannya yang disebabkan oleh rasa takut ke tempat kerja atau tempat umum lainnya, adalah penyebab utama guncangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa adanya keengganan atau rasa takut masyarakat untuk berkumpul di tempat umum yang tentunya sangat bertentangan dengan pengertian terminal itu sendiri yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai penumpang dari berbagai tempat dengan berbagai macam tujuan. Penelitian Dr. Machfud Sidik, M.Sc berjudul Optimalisasi Pajak dan Retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah menemukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian Razi Fauziah berjudul Analisis strategi optimalisasi penerimaan retribusi terminal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kota Palembang mengemukakan strategi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis melaksanakan penelitian ini dimasa pandemi covid-19 yang membuat permasalahan yang akan dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Medan akan lebih banyak dan penulis juga berfokus kepada pencegahan hingga mengurangi dampak dari pandemi covid-19 yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

## **1.5. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi-informasi serta data-data tentang bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap retribusi pelayanan terminal, apa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pelayanan

terminal terutama selama pandemi covid-19, dan upaya apa aja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

## II. METODE

Penulis menggunakan teori optimalisasi dari sutedi sebagai dasar penilaian penelitian ini. Menurut sutedi (2008:100) Optimalisasi adalah “dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pajak pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang”.

Berdasarkan teori sutedi (2008:100), optimalisasi pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain:

### 1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

### 2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

### 3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak *fiscus*, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

### 4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya

Dalam hal ini yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi.

### 5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu pendekatan yang dilakukan dari dalam artinya dilakukan pengamatan terlebih dahulu tentang masalah yang terjadi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Dalam pengamatan ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya diajukan menurut daftar pedoman wawancara yang telah disusun sedemikian rupa dengan baik kepada informan dan dalam pelaksanaannya lebih bebas agar hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan awal dari penulisan laporan ini. Seluruh data yang diperoleh dari laporan ini baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai metode analisis data dan disajikan secara deskripsi. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman yang mendalam secara menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai kondisi dan waktu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Partisipasi dalam Perencanaan**

Penulis mendapati bahwa kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan dampak yang buruk bagi penerimaan retribusi jasa terminal di Kota Medan. Artinya Peraturan Walikota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Medan menjadi salah satu faktor kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah dibidang Perhubungan.

Berdasarkan Hasil wawancara maka penulis mendapat gambaran bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan telah menjalankan Peraturan Walikota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Medan dengan baik. Dibuktikan dengan berjalannya transaksi non tunai yang dapat mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara penulis berasumsi bahwa kegiatan indentifikasi penerimaan retribusi seharusnya masih bisa lebih baik lagi. Jadi untuk saat ini kegiatan indentifikasi ini dapat dibilang belum berjalan dengan baik. Diketahui bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Pemda Kota Medan masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian juga diketahui bahwa perhitungan dari Dinas perhubungan Kota Medan lebih tepat karena pada tahun sebelumnya hasil perhitungan Dinas Perhubungan Kota Medan lebih mendekati penerimaan pada tahun tersebut. Penulis juga mendapati bahwa pelayanan di terminal sudah cukup baik, namun keadaan fasilitas terminal masih kurang dan perlu diperbaiki. Dilihat dari 3 indikator diatas Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dikatakan cukup baik dalam memperluas basis penerimaan, terutama pada perhitungan kapasitas penerimaan yang sangat tepat jika dibandingkan dengan

penerimaan yang akan didapat. Sehingga dapat diharapkan bahwa seharusnya Pemerintah Daerah Kota Medan bisa menggunakan cara perhitungan kapasitas atau target yang lebih baik seperti milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Kemudian diharapkan koordinasi antar Pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kota Medan bisa lebih baik dalam rangka peningkatan fasilitas terminal, kegiatan pembayaran retribusi secara online dan peningkatan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan 2 indikator tersebut dengan baik. Namun, pada kegiatan percepatan penyusunan peraturan daerah Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bisa menunggu Pemerintah Kota Medan melakukan revisi Peraturan Walikota Medan nomor 2 tahun 2014. Diharapkan Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan dapat bermediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. penulis menilai kegiatan peningkatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sudah baik karena tidak hanya menerapkan pengawasan secara manual dilapangan tetapi juga pengawasan berbasis teknologi yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian khusus dibidang IT. diketahui bahwa sebelumnya untuk melakukan pemungutan retribusi diperlukan biaya yang lebih karena memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak juga. Dengan pemanfaatan sistem informasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan maka dapat diketahui Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan yang dapat membantu mengoptimisasi penerimaan retribusi.

### **3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Medan selama ini berjalan cukup baik dengan pencapaian target yang mencapai lebih dari 90%. Namun, sejak adanya pandemi covid-19 pada maret 2020 menjadi salah satu rintangan baru yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Akibat hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan harus menghadapi kendala baik dari faktor eksternal maupun internal. Kendalan tersebut antara lain: PSBB, Menurunnya perekonomian masyarakat, dan Kurang Optimalnya Kinerja Pegawai Selama *Work From Home (WFH)*.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama pemungutan retribusi terminal dimasa pandemi covid-19 ini. Untuk tetap mengoptimalkan penerimaan retribusi terminal Dinas Perhubungan Kota Medan harus melakukan beberapa penyesuaian yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatasi dampak dari pandemi covid-19: Penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan nomor 27 tahun 2020 dalam bagian kelima tentang Kegiatan di tempat atau fasilitas umum pasal 14, Melakukan Subsidi Tarif, dan Mengatur Jadwal Kerja Kantor.

Dengan penerapan protokol kesehatan sesuai aturan diharapkan dapat mengurangi rasa takut sekaligus melindungi masyarakat sehingga dapat menggunakan fasilitas terminal secara lebih aman dan tenang. Sehingga masyarakat dapat tetap bisa menggunakan fasilitas terminal secara penuh dan dapat mengurangi dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mendukung program tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan mengalokasikan dana untuk mengadakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung penerapan protokol kesehatan di Terminal.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Budi menjelaskan bahwa “kami telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak dari berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat”. Dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat yang semakin melemah Dinas Perhubungan Kota Medan membuat beberapa kebijakan, antara lain:

1. Meringankan tarif retribusi kepada pengguna jasa terminal seperti perusahaan jasa angkutan umum
2. Melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa angkutan umum untuk menurunkan harga tiket
3. Melakukan promosi kepada masyarakat tentang penurunan harga tiket
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih angkutan umum karena telah mengikuti protokol kesehatan yang sesuai standar
5. Melakukan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat bahwa menggunakan kendaraan umum lebih hemat biaya

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi berkurangnya daya beli masyarakat terutama pada masyarakat yang sering menggunakan fasilitas terminal. Berdasarkan kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengatasi kendala ini penulis menyimpulkan kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Medan harus teliti dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang telah menetapkan tarif retribusi. Mungkin dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah penyesuaian tarif retribusi tersebut bisa dilakukan dengan cara yang aman.

### **3.3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil**

Peraturan Walikota Medan nomor 27 tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk mengurangi penyebaran covid-19 dilingkungan kantor maka harus ada pembatasan pegawai yang berada dilingkungan kantor. Lingkungan kantor atau tempat kerja hanya boleh diisi oleh 50% pegawai dari jumlah yang biasanya. Hal ini tentu saja berdampak pada tingkat pengawasan dan efektivitas pekerjaan yang menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Budi menjelaskan bahwa “dalam mengatasi kendala *work from home* ini kami melakukan 2 hal, yaitu mengatur jadwal masuk kantor dan meningkatkan internet dikawasan Dinas Perhubungan”. Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan membuat 2 kebijakan utama, yaitu:

1. Mengatur ulang jadwal datang kerja

Dinas Perhubungan Kota Medan mengatur jadwal pegawai yang harus masuk kantor berdasarkan tugas dan fungsi pegawai tersebut. Misalnya pada hari itu Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaksanakan pemungutan retribusi terminal, maka Dinas Perhubungan Kota Medan akan memaksimalkan pegawai yang berhubungan dengan retribusi terminal untuk masuk ke kantor dan pegawai lain dapat menyesuaikan pekerjaannya di rumah atau *work from home*.

2. Meningkatkan Kinerja Internet di Kantor

Untuk mempermudah komunikasi antar pegawai yang berada di kantor dan yang berada di rumah maka Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan peningkatan kinerja internet dikawasan kantor Dinas Perhubungan dan juga kawasan terminal yang di bawah oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemindahan data dan mengurangi kendala jaringan yang biasanya sering dihadapi.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi terminal dimasa pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem pemungutan sebelumnya, kegiatan pemungutan setelah adanya pandemi covid-19 berjalan menjadi lebih efektif dikarenakan adanya keharusan Dinas Perhubungan untuk tetap mencapai target, sehingga secara terpaksa Dinas Perhubungan harus beradaptasi dengan sistem online yang masih baru bagi Dinas Perhubungan Kota Medan.

## **IV. KESIMPULAN**

Optimalisasi pemungutan retribusi terminal dimasa pandemi covid-19 di kota medan sudah optimal dilihat dari teori Sutedi (2008), dari indikator yang telah ada Dinas Perhubungan Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik terutama tentang memaksimalkan teknologi dan transaksi online yang sangat dibutuhkan dimasa pandemi covid-19 ini. Namun tetap saja faktor pandemi covid-19 membuat jumlah penerimaan retribusi pada tahun 2020 jauh dari target meskipun pada bulan desember 2020 mulai terjadi peningkatan.

Kendala-kendala yang dialami oleh dinas perhubungan kota medan dalam optimalisasi pemungutan retribusi terminal antara lain:

- a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- b. Menurunnya perekonomian masyarakat



- c. Kurang Optimalnya Kinerja Pegawai Selama *Work From Home (WFH)*

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatasi kendala-kendala dalam optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Kota Medan adalah:

- a. Menerapkan protokol kesehatan
- b. Melakukan Subsidi tarif
- c. Mengatur jadwal kerja kantor

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada semua yang telah mendukung saya menyelesaikan penelitian ini, mulai dari Dosen pembimbing, jajaran Dinas Perhubungan kotan Medan, serta teman-teman yang telah mendukung saya.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Salim, H.A. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fahrudin, Adi dkk. 2020. *Perubahan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, A. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia